

ANALISA  
1975





# ANALISA

SELF-RELIANCE

DI BIDANG EKONOMI

TAHUN IV NO. 9

SEPTEMBER 1975





## PENGANTAR PENERBIT

Benarkah industrialisasi merupakan cara yang tepat untuk menyedot tenaga kerja? Apakah pola industrialisasi padat kerja merupakan langkah tepat bagi kebijakan perindustrian negara-negara sedang berkembang dalam keadaan perekonomian dunia dewasa ini? Pertanyaan-pertanyaan di atas masih dapat disambung dengan sedikit pertanyaan-pertanyaan lain. Namun masalahnya tidaklah terselesaikan dengan hanya mengajukan serentetan daftar pertanyaan belaka. Ia membutuhkan pemikiran, perumusan dan tindakan nyata! Dan tak kurang pentingnya pula adalah tindakan yang konsisten ke arah yang diinginkan bersama, yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan segenap bangsa Indonesia dan bukan kelompok per kelompok ataupun orang per-orang saja.

Dalam kerangka inilah Daoed JOESOEF menyampaikan beberapa pemikirannya dalam tulisannya berjudul "MASALAH POLA INDUSTRI, SEKURITI DAN INDEPENDENSI EKONOMI NASIONAL". Bidakankan di sini arti ekonomi sebagai "senjata" dan sekaligus "perisai" dalam pola hubungan internasional yang makin rumit dan saling-berkaitan (interdependensi) sifatnya. Oleh karena itu perlu adanya kesadaran untuk mengatur pola industri dalam kerangka memperkecil jarak ketergantungan (interdependensi) dan memperbesar kemampuan dan kepercayaan kekuatan nasional (self-reliance) khususnya di bidang ekonomi.

J. PANGLAYKIM menyajikan dua tulisannya berjudul "INC DAN DIPLOMASI KEKUATAN EKONOMI" dan "PENTINGNYA PENGUASAAN BIDANG INDUSTRI NASIONAL". Dari judul kedua artikel tersebut sudah dapat diduga bahwa permasalahannya berkisar pula kepada usaha mengurangi ketergantungan dari luar dan memperbesar kemampuan serta kepercayaan kekuatan nasional, melalui tindakan dan kebijakan yang tepat dan bukan sifat atau tindakan yang bersifat apriori.

Melalui kedua tulisan tersebut diajukan beberapa pemikiran, khususnya dalam bidang penyaluran dan pengadaan uang atau modal sebagai "darah" bagi kegiatan berusaha, dan bidang distribusi hasil produksi sebagai bagian dari bidang pemasaran (marketing) sebagai "jantung" perusahaan. Kedua tulisan tersebut merupakan pengantar bagi penelitian yang lebih mendalam sehubungan dengan usaha meningkatkan kekuatan ekonomi nasional.

Ketiga tulisan dalam penerbitan ANALISA bulan September 1975 ini pada hakikatnya merupakan pemikiran dalam usaha menciptakan amanat rakyat sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden SOEHARTO dalam sambutan pengarahan beliau di depan "Seminar Strategi Pembinaan Pengusaha Swasta Nasional", yaitu agar bangsa Indonesia dapat menjadi tuan di rumah sendiri.

September 1975

C.S.I.S.

# DAFTAR ISI

Hal.

Pengantar Penerbit

1

Masalah Pola Industri, Sekuriti dan Independensi  
Ekonomi Nasional

Daod JOESOEF

3

MNC dan Diplomasi Kekuatan Ekonomi

J. PANGLAYKIM

19

Pentingnya Penguasaan Bidang Distribusi Nasional

J. PANGLAYKIM

23

---

Diterbitkan oleh

CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES  
Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta Pusat





Baoed JCESOEF

Pola Industri dan Tambahan Nilai

Di dalam usaha mengindustrikan ekonomi kita, dewasa ini banyak sekali perhatian dicurahkan kepada pola yang bersifat "padat kerja". REPELITA II juga dengan tegas menyatakan bahwa ia menitik-beratkan proyek-proyek industri yang menggunakan lebih banyak tenaga manusia relatif terhadap modal.

Dengan mendahulukan sektor-sektor penyedot tenaga kerja terbesar di dalam proses industrialisasi, atau dengan perkataan lain, dengan menerapkan apa yang secara populer disebut sebagai "model Hongkong", berarti industrialisasi ditujukan untuk mengabdi kepada kepentingan sosial. Bukankah tujuan industri di sesuatu ekonomi memberikan kesempatan kerja yang sebanyak-banyaknya kepada manusia? Dan melalui kesempatan kerja itu, menaikkan pendapatan?

Memang benar masalah kesempatan kerja atau, kebalikan dari itu, masalah pengangguran, merupakan masalah sosial yang harus ditanggulangi oleh aktipitas industriil, jadi oleh bidang ekonomi. Pada setiap waktu, baik di waktu damai maupun di waktu perang, bidang ekonomi sangat peka terhadap keributan-keributan sosial, terutama bila ia bersumber pada masalah pengangguran. Tambahan lagi bukankah keseimbangan sosial di sesuatu masyarakat dalam dirinya merupakan salah satu bagian penting dari keschatan bangsa. Sesuatu bangsa, walaupun ekonominya telah maju, tetapi bila di dalam tubuhnya terdapat kepingangan sosial, berarti sangat peka, terutama di bidang ekonominya itu.

Namun hendaknya disadari bahwa proyek industri yang bersifat padat kerja tidak memberikan "tambahan nilai" (value added) yang berarti, lebih-lebih bila proyek itu dengan sengaja ditujukan untuk memperkerjakan tenaga kerja murah yang tidak berkeoakapan tinggi (unskilled labour). Jadi pola industri

↓

seperti ini di dalam jangka panjang tidak terlalu membantu memperkuat "bargaining position", kita terhadap luar negeri dan karenanya, tidak terlalu efektif bagi usaha kita memperbaiki "dasar pertukaran" (terms of trade) kita terhadap luar negeri. Tambahan pula ia tidak memberikan sumbangan yang berarti bagi perkembangan teknologi, yaitu jenis perkembangan yang secara essensiil telah membentuk satu "ekonomi dunia" di mana ekonomi kita berada. Kecuali bila pola padat kerja itu diterapkan secara besar-besaran di bidang pembuatan prasarana industriil yang sangat menentukan perkembangan ekonomi di masa depan, seperti pembuatan waduk bertujuan-ganda (sekaligus untuk irigasi dan pembangkitan tenaga listrik), jalan raya pokok, trowongan ataupun jembatan yang membuka daerah-daerah produktif yang selama ini tertutup ataupun terpencil, seperti yang dilakukan secara sadar dan sistimatik oleh RRC. Hal ini berarti mengesampingkan azas efisiensi ekonomi sekarang demi efektivitas ekonomi di masa depan dengan dikawinkan dengan pemecahan masalah sosial sekarang.

Selanjutnya yang perlu disadari adalah bahwa bila proses industriil tidak terlalu menimbulkan "tambahan nilai" maka, berdasarkan tingkat konsumsi yang berlaku, pendapatan nasional tidak terlalu memberikan sisa yang cukup, baik untuk re-investasi atas kekuatan sendiri, maupun untuk mendukung aksi-aksi ekonomi lainnya yang ditujukan ke arah kepentingan sekuriti nasional. Akibatnya, untuk memungkinkan re-investasi ataupun investasi baru, kita harus meminjam lagi untuk keseharian kalinya, yang berarti menjadi semakin tergantung kepada luar negeri, menjadi semakin peka karena struktur ekonomi tidak berubah secara berarti dan semakin memperlemah bidang sekuriti bangsa.

Kalau di atas tadi diingatkan perlunya perhatian atas masalah sekuriti nasional, bukanlah harus berarti betapa perlunya disisihkan sebagian dari pendapatan nasional untuk investasi di dalam industri militer, seperti pabrik senjata, pembuatan kubu pertahanan dan alat-alat berperang lainnya. Azas sekuriti di sini diketengahkan semata-mata untuk mengingatkan bahwa kalau usaha menaikkan tingkat kemakmuran memerlukan adanya sekuriti, namun kemakmuran yang diciptakan oleh usaha pembangunan itu tidak dengan sendirinya dapat menciptakan sekuriti. Maka itu di dalam memikirkan pola-pola industri seharusnya tidak dilupakan usaha-usaha yang semenjak sekarang ini sudah harus dilakukan ke arah memperbesar

independensi ekonomi nasional dan "self-reliance" di dalam jangka panjang. Independensi ekonomi yang absolut momang tidak mungkin. Dengan independensi seharusnya diartikan sebagai usaha "mengurangi ketergantungan yang tidak seimbang" di bidang ekonomi di dalam ekonomi dunia yang sudah menjadi semakin interdependen. Usaha ini penting berhubung "ekonomi" juga merupakan "senjata" di dalam hubungan internasional, baik di masa damai dan lebih-lebih di masa perang.

### Senjata Ekonomi dan Sekuriti

Bila ekonomi ditanggapi sebagai "senjata", atau kebalikannya sebagai "porisai", maka dapat dibayangkan betapa ia bersifat langsung maupun tidak langsung. Berhubung terbatasnya ruangan, tidak akan dibahas di sini peranan potensial senjata ekonomi dalam perspektif aksi ekonomi langsung. Lagi pula aksi seperti ini ternyata pada umumnya kurang menentukan, sesedikitnya di dalam jangka pendek, kecuali bila penerapannya didukung oleh satu kondisi politik-strategis yang cukup masak seperti halnya "senjata minyak Arab" baru-baru ini. Sebaliknya di dalam jangka panjang senjata ekonomi merupakan alat transformasi dan sivilisasi teknik yang ampuh, jadi merupakan alat aksi yang sama pentingnya dengan aksi revolusioner. Hal ini membawa kita ke pemikiran bahwa senjata ekonomi berhubungan dengan bidang aksi tidak langsung yang kiranya layak dijajaki.

Jika kita mengambil analogi dengan definisi strategi tidak langsung di bidang militer, yaitu aksi di mana elemen yang menentukan datang dari aksi-aksi yang bersifat non-militer, maka aksi ekonomi tidak langsung adalah tindakan yang elemen-elemennya yang menentukan bersumber pada bidang-bidang yang lain dari bidang ekonomi. Definisi seperti ini mungkin kurang memuaskan karena ia berarti keharusan mengkaji sepuas aksi-aksi yang berbeda dengan senjata ekonomi. Maka itu aksi ekonomi tidak langsung memerlukan definisi lain yang lebih persis. Pada tingkat pertama kiranya dapat dikatakan bahwa dengan itu dimaksudkan aksi yang menimbulkan akibat-akibat yang gawat dan kadangkala menentukan sekali di bidang ekonomi melalui peralatan yang bersifat non-ekonomi. Bila demikian dapat dibayangkan berbagai kategori aksi ekonomi tidak langsung,

seperti: kegaduhan sosial (pemogokan, demonstrasi), blokade militer, pengeboman, perang subversif (desas-desus), perang gerilya, perang total dan lain-lain lagi termasuk berbagai macam kategori intermediair. Pada azasnya ekonomi lawan yang menjadi sasaran, tetapi diserang secara tidak langsung.

Jadi bila ekonomi sulit berperan sebagai alat aksi ofensif, kecuali dalam jangka panjang, ia sebaliknya merupakan bidang yang peka dan rawan dan yang mudah dioapai oleh peralatan non-ekonomi daripada peralatan ekonomi. Maka bila dilihat dari sudut sekuriti dan melalui kacamata defensif, kiranya dapat dikatakan bahwa ekonomi merupakan medan aksi yang sangat peka dan yang secara relatif mudah dikacau-balaukan melalui peralatan serta cara tidak langsung. Kekacauan ekonomi tersebut pada gilirannya terang berakibat melemahnya struktur sosial dan merosotnya, kalaupun tidak kehancuran total, moral masyarakat. Jadi pada tingkat terakhir, bukan lagi ekonomi yang runtuh, tetapi keseluruhan negara dan/atau masyarakat itu sendiri.

Bila di atas reruntuhan tersebut fihak lawan, yang melancarkan aksi tidak langsung tadi, lalu membangun satu negara dan masyarakat baru berdasarkan nilai-nilai yang asing bagi masyarakat lama yang runtuh tadi, maka kiranya dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan "sekuriti" adalah kesanggupan suatu negara, bangsa dan/atau masyarakat untuk hidup, berkembang dan menikmati perkembangan itu sesuai dengan kebudayaan serta nilai dan pandangan hidupnya sendiri. Dengan definisi yang luas ini berarti bahwa masalah sekuriti secara implisit meliputi ancaman tidak hanya dari luar tetapi juga dari dalam. Selanjutnya ia dapat diartikan pula bahwa kebutuhan terhadap adanya sekuriti tidak terpenuhi apabila untuk melindungi dirinya dari kehancuran fisik, negara, bangsa atau masyarakat yang bersangkutan terpaksa mengorbankan nilai-nilai yang dihayatinya selama ini dan menggantinya dengan nilai-nilai yang disodorkan secara paksa oleh negara-bangsa (nation-state) lain.

Maka bila kita membatasi diri pada bidang ekonomi dan pembangunannya dilihat dari sudut sekuriti dan dari kacamata defensif (ketahanan nasional), kiranya kita perlukan satu ekonomi nasional yang kurang rawan relatif terhadap gangguan dari bidang lain dan kurang peka terhadap gangguan dari luar. Ekonomi seperti ini kiranya adalah satu ekonomi yang relatif

maju secara teknologis dan yang relatif independen di tengah-tengah ekonomi dunia yang secara esensial bersifat interdependent. Sejauh proses industrialisasi diperlakukan sebagai alat pembangunan ekonomi yang dapat memenuhi kebutuhan sekuriti, maka pola industri padat kerja kiranya tidak dapat dipegang sebagai satu-satunya azas strategi industri, walaupun untuk jangka pendek. Bila pola seperti ini yang dipakai sebagai azas penuntun dalam jangka panjang terang ia akan meratakan jalan ke arah terbentuknya satu ekonomi nasional yang terlalu rawan berhadapan dengan tekanan dari luar walaupun barangkali tidak terlalu peka terhadap gejolak sosial di dalam negeri.

Berhubung dengan apa yang telah diuraikan di atas, strategi industri dewasa ini perlu ditujukan ke arah terciptanya satu ekonomi nasional yang relatif independen dengan kadar kerawanan dan kepekaan yang minimum, yang fondasinya perlu diletakkan dari semenjak sekarang sebab untuk ini diperlukan satu proses berjangka panjang. Imperatif (tuntutan) industriil seperti ini memerlukan peninjauan yang cermat mengenai: lingkungan industriil; konsepsinya, harganya dan, berdasarkan semua itu, tindakan-tindakan yang perlu diambil guna melancarkan usaha mengindustrikan ekonomi kita.

### Lingkungan Industriil

Lingkungan industriil adalah keseluruhan peristiwa (fakta) yang penampilan dan kecenderungannya mengkondisikan pertumbuhan industriil. Dipandang dari pengertian ini dapat dibedakan antara kondisi internasional dan nasional. Di ruang lingkup internasional semakin kelihatan kecenderungan perpindahan industri pembuatan barang ke arah dunia ketiga. Ekonomi industri maju yang merupakan sepertiga bagian dari dunia, sebagai akibat desakan ekonomi dan sosial dari dalam yang semakin menekan, terpaksa bergerak ke arah masa post-industri dan karenanya semakin menggeserkan industri pembuatan barang kepada negara-negara miskin yang terletak di belahan Selatan bumi. Dengan perkataan lain, dalam ekonomi dunia yang semakin tumbuh ini, ada kecenderungan bahwa ekonomi industri yang sudah maju akan mengekspor lebih banyak usaha industri pembuatan barang daripada mengekspor barangnya itu sendiri, terutama industri klasik seperti industri besi-baja, kimia dan industri ringan. Sebaliknya usaha industriil yang mereka

8

pertahankan untuk diusahakan sendiri adalah produksi barang dan jasa yang berhubungan dengan pendidikan, kebudayaan, santai (leisure), transport dan urbanisme, demi melayani permintaan dalam negeri yang polanya sesuai dengan yang dituntut oleh penghidupan modern berpendapatan tinggi.

Bila kondisi internasional secara potensiil dapat dikatakan menguntungkan (favourable) bagi hasrat kita untuk membangun sektor industri domestik, dalam artian arus "angin" industriil searah dengan yang kita kehendaki, tidak demikian halnya dengan kondisi industriil nasional. Di satu fihak jiwa dan sektor bisnis domestik masih terbelakang, sedangkan pada umumnya sesuatu perusahaan asing ataupun internasional besar kemungkinannya akan datang ke sesuatu negara sedang berkembang dan meminta izin berusaha di situ apabila negara yang bersangkutan justru sudah memiliki jiwa dan sektor bisnis domestik yang hidup. Di lain fihak negara kita masih sangat kekurangan tenaga teknisi menengah yang sangat diperlukan bagi kelancaran jalannya sesuatu usaha industri di bidang apapun, terutama industri pembuatan jenis barang yang paling mutakhir ataupun yang menyangkut-pautkan elektronika.

### Konsep Industriil

Sejauh mengenai konsep, dapat dilihat dari tiga sudut: makro, mikro dan strategis. Konsep menjadi penting karena usaha mengindustrikan ekonomi secara implisit menyangkut masalah investasi dan pembiayaan. Apabila kita berbicara tentang investasi dan pembiayaan kita harus menyinggung proyek: cara penggambarannya, cara penyajiannya kepada masyarakat, pendiriannya dan operasinya. Masalah garis besar pola dan kebijaksanaan investasi dianggap penting berhubung kedua hal itu menentukan dasar-dasar pemilihan, penggambaran, pendirian dan pelaksanaan proyek-proyek.

Di dalam meneliti konsep dari sudut makro, kiranya perlu disadari adanya perbedaan yang fundamental di dalam orientasi dan prioritas yang timbul dari kebijaksanaan pengembangan sumber-sumber, tergantung pada, (i) apakah pengembangan tersebut didorong oleh pertimbangan kesempatan kerja dan penghasilan devisa sebagai bagian keseluruhan tujuan-tujuan pembangunan ataukah, (ii) oleh hasrat menggali sumber bahan baku dan mentah semata-mata. Perbedaan ini tetap ada terlepas

dari soal apakah yang menjadi pengusahanya adalah orang asing, multi national corporation (MNC), swasta nasional ataukah pemerintah nasional.

Apabila pengembangan sumber didorong oleh pertimbangan yang kedua dari yang disebut di atas, maka bentuk yang khas dari proyek yang bersangkutan adalah apa yang lazim disebut sebagai "colonial enclave": maskapai pertambangan, penebangan kayu ataupun tanaman ekspor. Usaha ini tumbuh dan berkembang seorang diri, tanpa memikirkan (perkembangan) keadaan sekitarnya. Pola pengembangan seperti ini disebut menurut konsep "perkembangan indifferensiil".

Apabila pengembangan sumber didasarkan pada motif pertama, bentuknya yang ideal adalah proyek pembangunan wilayah yang menyeluruh dan bertujuan ganda (multipurpose, integrated area development); yang ditujukan ke arah eksplorasi keseluruhan sumber yang tersedia di wilayah yang bersangkutan dalam rangka menaikkan secara maksimal tingkat kehidupan penduduk di situ. Maka sebagai keseluruhan usaha ini berupa berbagai ragam proyek yang saling menunjang, yang intinya mungkin saja berupa proyek eksplorasi sumber dalam bentuk pertambangan, penebangan kayu ataupun perkebunan. Tetapi terhadap proyek inti tersebut dikaitkan secara eksplisit, dan diperlakukan sebagai bagiannya yang integral, pembangunan dari sumber-sumber kehidupan lainnya, satu dan lain guna memungkinkan penduduk setempat memperoleh berbagai macam sumber penghasilan. Jadi proyek seperti ini tidak hanya menyangkut urusan penyewaan sumber-sumber alam dan suplai tenaga kerja murah tetapi juga urusan merubah kehidupan ekonomi sesuatu wilayah dan preservasi keseimbangan sosial. Dengan begini lebih terjamin kelak bahwa dari bidang sosial tidak akan datang gangguan terhadap bidang ekonomi berhubung manusia-manusia setempat diikutsertakan sebagai "peserta" yang aktif di dalam proses pembangunan industriil dan tidak hanya sebagai "penonton" yang pasif. Dengan begini terciptalah suatu hubungan yang lestari antara bidang ekonomi dan bidang sosial; terutama pada tingkat daerah dan melalui kelestarian ini dapat lebih diharapkan terciptanya ketenangan politik pada tingkat nasional. Apabila pola industriil seperti ini yang diterapkan maka ia dilandaskan atas konsep "pertumbuhan organik", artinya pertumbuhan sesuatu bagian dari sistem bertanggung jawab atas pertumbuhan bagian-bagian lainnya atau,

dengan pernyataan lain, pertumbuhan bagian-bagian dari satu sistem tergantung dari pertumbuhan ataupun ketidak-tumbuhan dari bagian yang lainnya.

Sejauh usaha mengindustrikan ekonomi kita memerlukan pemasukan usaha industri asing dan/atau pemindahan teknologi dari luar maka konsep pola dan mekanisme industri perlu pula ditinjau dari sudut mikro. Sebab dalam hal ini kiranya tidak dapat lagi dianggap cukup bila pemindahan itu berupa sekedar impor pabrik, lengkap dengan "kunci" dan "know-how"-nya sekali. Di samping ini semua masih harus diperhatikan pula kepastian faktor "show-how", yaitu pengajaran dan latihan bagaimana menggunakan peralatan pabrik yang ada secara sifatnya selama satu jangka waktu tertentu dari enam bulan sampai tiga atau lima tahun, tergantung pada jenis industri dan tingkat teknologi yang bersangkutan. Sehubungan dengan faktor ini ada baiknya diketahui konsep yang diterapkan di berbagai negara Afrika, terutama Aljazair. Adapun pemikiran yang dikandung oleh konsep negara-negara tersebut adalah bagaimana menguasai teknologi yang mengintegrir secara sistematis keseluruhan proses produksi dari awal sampai akhir. Untuk industri baja, misalnya, Aljazair meminta supaya masuknya asing, yang menurut kontrak harus membangun pabrik itu, melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti berikut: membina staf pimpinan, teknisi dan buruh yang direkrut senata-mata dari kalangan warga Aljazair, membuat supaya produksi berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan mengadakan kontrak-kontrak penjualan hasil produksi. Selanjutnya kontraktor asing itu masih harus menjamin kesatuan proses produksi baja yang bersangkutan terhadap risiko kerusakan teknik atau risiko kemunduran penjualan di pasaran internasional, selama jangka waktu duapuluh tahun.

Di samping ini pada tingkat mikro perlu pula ditinjau secara mendalam, satu demi satu menurut keadaan (case) atau menurut proyek, kopaluan ide yang sepihak laju kelikatan-nya murni (innocent), yaitu konsep-konsep industrialisasi melalui substitusi impor dan perlunya perlindungan (proteksi) bagi industri muda yang baru tumbuh. Bila konsep pertama tersebut dilaksanakan, merangkuk kurang menghadapi masalah pola-pola permintaan (pasaran). Tetapi masalah yang perlu dipikirkan dalam hal ini adalah apakah pola permintaan yang ada,

sebagaimana yang terlihat dalam komposisi impor yang berlaku, benar-benar mencerminkan preferensi mayoritas penduduk, ataukah sebenarnya hanya mewakili preferensi sebagian kecil saja (minoritas) penduduk yang tergolong pada lapisan berpendapatan tinggi, dan karenanya mengandung kemungkinan bahwa kelak pasaran domestik telah mencapai titik kejemuhan jauh sebelum produksi komoditi yang bersangkutan mencapai titik optimum yang dibenarkan secara ekonomis.

Di samping lain, kebijaksanaan proteksi sebagai alat mengindustrikan ekonomi nasional dapat saja menjadi sangat mahal, apabila dilaksanakan tanpa penelitian yang masak lebih dahulu. Berhubung dengan itu konsep dan alasan proteksi terhadap industri muda acapkali membuka kemungkinan terbentuknya struktur industri yang ditandai oleh kehadiran pabrik-pabrik yang bekerja dengan ongkos tinggi terus-menerus dan karenanya menjadi sangat peka terhadap perkembangan berbagai macam faktor dari luar. Bila demikian usaha mengindustrikan ekonomi bukannya memperkuat ketahanan ekonomi nasional, tetapi sebaliknya menyeret ekonomi semakin jauh dari tingkat "self-reliance" dan independensi ekonomi nasional.

Di dalam memilih pola industri perlu pula diperhitungkan faktor "kebebasan strategis". Dengan kebebasan seperti ini dimaksudkan besar-kecilnya kemungkinan yang kita punyai untuk merubah segala sesuatu yang bekerja untuk keperluan damai menjadi segala sesuatu yang diperlukan untuk melayani kebutuhan pertahanan di masa perang, baik di dalam dimensi ruang maupun di dalam dimensi waktu. Bila untuk memperbesar kebebasan strategis itu industrialisasi dianggap sebagai faktor pendorong yang lebih kuat dari pertanian, maka kekuatan tersebut bukanlah terletak pada jumlah pabrik yang sanggup berproduksi dengan teknologi tinggi yang tersebar di seluruh penjuru tanah air, tetapi lebih banyak ditentukan oleh intensitas keterlibatan dan integrasi usaha pabrik tersebut ke dalam jaringan ekonomi nasional. Sifat dan komposisi usaha industri memang penting, tetapi dipandang dari sudut pembinaan ketahanan nasional masih jauh lebih penting lagi "kedalaman" usaha tersebut daripada "keluasannya". Kedalaman sebagaimana diukur dari sampai berapa jauh dan kukuh ia diintegrir dengan ekonomi nasional, sedangkan keluasannya sebagaimana diukur dari jumlah usaha industri yang terdapat di dalam negeri.

### Harga yang harus dibayar

Untuk setiap usaha yang ditujukan ke arah sesuatu keuntungan, apakah keuntungan itu dalam bentuk manfaat materiil ataupun manfaat spirituul, terpaut harga yang harus dibayar atau pengorbanan yang harus dilakukan. Dalam masalah yang menjadi pembahasan di sinipun, baik harga maupun pengorbanan tersebut tidak harus selalu berbentuk materiil (uang), ia dapat saja dalam bentuk immateriil, seperti perasaan, kebiasaan hidup, keindahan alam.

Sejauh yang mengenai usaha mengindustrikan ekonomi, perlu diingat bahwa pada setiap pemilihan jenis dan pola industri serta teknologi yang erat berkaitan dengan itu, yang diperlukan tidak hanya menghitung keuntungan dan manfaat yang dapat ditarik dari proyek yang bersangkutan, tetapi sekaligus harus pula dinilai akibat-akibat atau konsekuensi sekunder yang ditimbulkannya di bidang-bidang ekologi, ekonomi, sosial dan politik.

Di bidang ekologi, misalnya, usaha industri klasik yang oleh negara maju secara berangsur-angsur dipindahkan ke negara-negara terbelakang, terbukti dalam dirinya mengandung pengotoran alam walaupun dengan intensitas yang berbeda-beda. Sebenarnya, terlepas dari industri klasik atau modern, perlu disadari bahwa setiap sivilisasi industriil membawa akibat destruktif pada kemurnian alam: pengotoran, pencemaran keindahan, merusak pemandangan, keributan dan masih banyak lagi yang dapat disebut secara terperinci satu per satu.

Di bidang ekonomi, sebagai akibat masuknya usaha industri asing, dimensi dan sifat dunia usaha nasional menjadi otomatis berubah. Perubahan-perubahan ini semakin berat terasa untuk kita, bukan saja karena rupa-rupanya dahulu fihak perencana ekonomi tidak menyadarinya sehingga karenanya tidak memikirkan berbagai macam persiapan yang diperlukan guna menghadapinya, tetapi juga karena usaha industri asing itu pada umumnya ber-skala besar, dinamik, berpengalaman, biasa bekerja kompetitif dan beroperasi dengan cara-cara serba modern. Berhubung dengan ini, dan ditambah pula dengan persiapan-persiapan yang terlambat dari fihak perencana kita dan karena terlambat itu lalu bersifat tergesa-gesa dan kurang mendalam, kehadiran usaha industri asing yang seharusnya dapat berfungsi edukatif, kini lebih banyak dirasakan sebagai hantu destruktif, sedangkan

persaingan yang dalam banyak hal bersifat tak seimbang lalu dicap sebagai tidak adil, sehingga masalahnya digeser dari bidang ekonomi ke arah bidang (doktrin) politik dan sosial.

Di bidang sosial, proses industrialisasi mengakibatkan kepenuh-sesakan, perubahan-perubahan maupun mutasi di tempat dan bidang tertentu serta perbedaan-perbedaan yang semakin menonjol, lebih-lebih bila proses tersebut diletakkan dalam rangka pembangunan ekonomi pada umumnya. Sebenarnya baik kepenuh-sesakan, perubahan maupun perbedaan berhubungan erat dengan ambivalensi dari proses pembangunan itu sendiri. Hal-hal tersebut tidak dapat dielakkan, namun bukan berarti tidak dapat dikurangi dan bukan pula berarti bahwa pembangunan itu sendiri tidak mungkin lebih dihumanisir. Tetapi anggapan bahwa usaha pembangunan, lebih-lebih bila pembangunan itu melalui proses industrialisasi, dapat dilakukan tanpa konsekuensi tersebut di atas, adalah satu illusi. Sebab, untuk membangun perlu perombakan dan pembaharuan, jadi perubahan dan mutasi, karena pembaharuan pada dasarnya adalah pembangunan itu sendiri. Dan dengan pembaharuan hendaknya difahami bukan hanya perubahan di bidang bangunan, tetapi perubahan di bidang cara berfikir dan cara berbuat sesuatu. Perubahan-perubahan seperti ini, betapapun perlunya, terang merusak keseimbangan dan kepastian tradisionil dalam diri perorangan ataupun kelompok perorangan, sesedikitnya pada tahap pertama yang dalam dirinya berupa tahap peralihan.

Di sisi lain, program pembangunan itu, yang berupa berbagai macam proyek industriil dan bisnis, dalam dirinya merupakan tawaran dan kesempatan kerja. Tetapi kecepatan dan kesanggupan orang untuk menyambut (memberikan respon terhadap) tawaran itu tidak sama, tergantung dari latar belakang pengalamannya, kecakapan teknisnya, keberaniannya mengambil risiko, inteligensinya dan bahkan intuisinya. Siapa yang lebih cekatan, lebih cerdas ataupun lebih cakap dalam meninjau ke depan, akan mendapat kesempatan lebih dahulu di dalam "tawaran pembangunan" itu. Berhubung dengan ini dapat saja perbedaan yang telah ada, baik di bidang pendapatan maupun di bidang pendidikan ataupun di bidang usaha, menjadi semakin menonjol dan perbedaan-perbedaan seperti ini mudah sekali dicap sebagai bertentangan dengan azas keadilan. Padahal tidak setiap perbedaan bertentangan dengan keadilan.

Kalaupun di sini diingatkan konsekwensi dan akibat proses industrialisasi bukan berarti otomatis menganjurkan supaya proses seperti itu dihentikan saja. Pengajuan ini sekedar peringatan bahwa di dalam memikirkan dan mempolakan proses industrialisasi hendaknya tidak hanya difikirkan bagaimana dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari kondisi industriil yang ada, tetapi sekaligus difikirkan pula strategi untuk menekan serendah mungkin "harga" (ransum) yang harus kita bayar demi peningkatan manfaat industriil itu. Di bidang ekologi, misalnya, dahulu mungkin sekali keindahan dan kebersihan alam terpaksa dikorbankan demi pendirian industri, tetapi sekarang pengotoran alam banyak sedikitnya sudah dapat dikuasai dan untuk keperluan ini beberapa negara industri maju di Eropah Barat dan Jepang, misalnya, sudah relatif maju. Maka itu teknologi pencegah pengotoran alam sudah dapat diimpor bersamaan dengan teknologi pembuatan barang. Dengan begini usaha mengindustrikan ekonomi yang kita lakukan sekarang tidak perlu dan tidak harus berarti bahwa akan kita wariskan kepada generasi yang akan datang satu alam Indonesia yang sudah cacat, yang lebih kotor, lebih buruk dan lebih menyesakkan.

#### Tindakan yang Diperlukan

Kalau di atas tadi ada dikatakan kecenderungan pengeseran industri pembuatan barang ke arah dunia ketiga, kiranya tidak boleh diartikan bahwa "dengan sendirinya" sebagian akan masuk ke Indonesia. Angka-angka terakhir di bidang penanaman modal asing (PMA) di sini malahan menunjukkan gerak yang menurun. Apakah usaha industri asing akan masuk atau tidak ke negeri kita terang merupakan fungsi dari banyak faktor. Salah satu di antaranya yang penting adalah penjelasan dan penerangan. Maka itu kalau kita mau supaya sebagian yang penting dari mereka masuk dan bekerja di sini guna mengejar ketinggalan kita di bidang industri dan perkembangan teknologi, kita harus berusaha secara sadar dan sistematik untuk "menjaring" mereka.

Untuk ini perlu sekali Indonesia mendirikan lembaga-lembaga informasi industriil dan bisnis di pusat-pusat kegiatan industri dan bisnis dunia. Apakah lembaga seporti ini bordiri sendiri atau diintegrir dengan perwakilan-perwakilan Indonesia yang sudah ada di negeri-negeri maju, bukan morupakan masalah

yang esensiil. Yang penting adalah bahwa lembaga itu harus dapat bekerja secara efektif dan untuk ini ia harus dipercepat yaitu kepada analis ekonomi dan politik yang kompeten serta lincah dan aktif dan bukan birokrat yang hanya duduk di belakang meja secara pasif menunggu "tamu" datang sambil menggunakan koran lokal untuk kebutuhan disalin sebagai "laporan" ke Jakarta. Indonesia harus menyadari bahwa di tengah-tengah ekonomi dunia yang begitu dinamis, keputusan di bidang investasi dan produksi akan makin diambil berdasarkan komunikasi dan informasi yang cepat. Sebaliknya analisa-analisa yang dikirim oleh lembaga tersebut diperlukan pula oleh pemerintah sebagai data yang esensiil di bidang pengambilan keputusan. Begitulah yang sampai kini, misalnya, dilakukan oleh Economic Development Board (EDB) Singapura dan atase ekonomi-perdagangan Jepang dan berbagai negara Afrika di berbagai pusat negara industri maju di dunia ini.

Walaupun informasi dan data dapat diberikan secara cepat dan tepat, namun salah satu umpan yang menentukan di dalam menjarang usaha industri asing adalah tenaga teknisi menengah yang tersedia. Di atas tadi telah dikatakan betapa di bidang ini Indonesia sangat berkekurangan. Maka itu kekurangan ini harus diisi secepat mungkin melalui satu program training teknik yang sistimatik. Perlu diketahui bahwa teknisi menengah ini, di negeri manapun, pada azasnya tidak "diprodusir" oleh lingkungan pendidikan formal. Sekolah-sekolah, termasuk sekolah teknik menengah, paling jauh hanya dapat memberikan kesanggupan menguasai peralatan analisa dan pengenalan sebagian peralatan teknis yang "umumnya" dipakai. Teknisi menengah ditempat di pusat-pusat kegiatan produksi dan bisnis dan di negeri-negeri maju pusat-pusat kegiatan seperti itu tidak kurang jumlahnya, dalam bentuk berbagai macam pabrik, galangan kapal, usaha assembling, bisnis dan lain-lain. Di negeri kita justru pusat-pusat kegiatan industriil seperti ini yang belum ada, sedangkan pendirian pusat-pusat produktif seperti itu justru tergantung dari ada-tidaknya teknisi menengah yang kompeten. Maka terjadilah lingkaran yang tidak ada ujung-pangkalnya. Maka untuk dapat ke luar dari lingkaran yang mengeklik usaha industriil ini kiranya perlu diciptakan pusat-pusat latihan di samping sekolah teknik yang jumlahnya juga belum banyak. Sbenarnya latihan-latihan seperti itu sudah ada di sektor non-pemerintah, seperti yang antara lain dilakukan oleh sekelompok tenaga pengajar ITB. Tetapi usaha-usaha

itu baru berskala kecil berhubung kekurangan biaya. Harus diakui usaha training teknisi menengah memerlukan biaya yang tidak sedikit. Berhubung dengan itu kiranya perlu difikirkan secara bagaimana pusat-pusat latihan yang sudah ada itu, yang sudah membuktikan kesanggupannya, dapat memperoleh dana yang mereka perlukan secara teratur. Barangkali ada baiknya berbagai macam Yayasan yang sudah ada, yang selama ini pada pokoknya bergerak di bidang pemberian bea siswa untuk pelajar dan mahasiswa umum, kini secara berangsur-angsur semakin memberikan dana mereka ke pusat-pusat latihan teknis tersebut. Dipandang dari sudut perubahan struktur ekonomi kita dari agraris-tradisionil ke arah industriil-teknologis, pemblokiran aktipitas pemberian dana (bea siswa) seperti yang diusulkan ini, terang akan lebih efektif.

Alat yang ampuh pada waktu ini untuk memindahkan usaha industri dan teknologi asing ke negeri terbelakang seperti kita, adalah maskapai asing besar dan/atau yang lazim disebut sebagai "multi national corporation" (MNC). Namun kehadiran sesuatu MNC terang membawa berbagai macam masalah. Karena strukturnya berskala besar dan modal serta usahanya berdimensi internasional, MNC menimbulkan masalah tidak hanya di negeri terbelakang, tetapi juga di negeri-negeri maju sekalipun, termasuk negeri yang dapat dianggap sebagai negara induknya. Maka itu masalah ini perlu mendapat perhatian dan pembahasan yang serius di mana generalisasi yang ditarik secara mudah seringkali malah mengecohkan. Pembahasan masalah ini harus pula diletakkan sebagai bagian dari masalah industrialisasi dan pembangunan yang serba kompleks dan saling berkaitan yang satu dengan lainnya. Masalah yang sudah begitu kompleks dan luas, semakin dirumitkan lagi oleh berbagai masalah yang ditimbulkan oleh tatanan ekonomi dunia yang tumbuh menurut kodratnya sendiri secara otonomi, mempunyai dinamika sendiri, aturan bermainnya sendiri, lembaga-lembaganya sendiri, "uang"-nya dan sistem kreditnya sendiri. Di samping semua masalah yang banyak sedikitnya bersifat makro ini, tidak boleh pula dilupakan masalah yang berhubungan dengan keharusan kita membina daya bersaing usaha industri nasional terhadap usaha industri asing yang sudah ada di sini. Harus diakui bahwa usaha menaikkan daya bersaing dunia usaha dan industri kita bukan masalah yang sederhana. Setiap cabang usaha dan industri memerlukan cara dan perhatian yang tersendiri, yang secara khas berhubungan dengan situasi dan kondisi masing-masing yang unik.

Maka itu untuk memikirkan cara menanggulangi masalah-masalah yang begitu luas, kompleks dan saling berkaitan, kiranya sudah waktunya kita (Pemerintah dan Non-Pemerintah) membentuk satu komisi khusus, yaitu yang menurut tugasnya dapat disebut sebagai "Komisi modernisasi dunia usaha dan industri". Adapun misi pokok Komisi khusus itu sesedikitnya adalah seperti berikut: Pertama, memikirkan cara bagaimana supaya pemerintah melalui kebijaksanaannya, dapat menciptakan satu lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang tidak hanya memungkinkan perkembangan industri tetapi lebih-lebih membuat transformasi yang diakibatkan perkembangan itu menjadi lebih dapat diterima oleh orang-orang yang tersangkut dan terkena; dalam rangka ini perhatian yang khusus harus diberikan kepada beberapa aksi tertentu seperti politik penempatan tenaga dan formasi profesional, prasarana, riset industriil, penyuluhan ekonomi, dan lain-lain. Kedua, memikirkan tindakan-tindakan langsung yang ditujukan guna mempercepat proses modernisasi sektor-sektor industri tertentu untuk mempermudah perubahan (conversion) yang hendak dijalankan oleh beberapa perusahaan dalam sektor industri tertentu dan demi memperbesar "kebebasan strategis" dalam rangka pembinaan ketahanan nasional. Ketiga, menggariskan "aturan bermain" yang diperlukan bagi perusahaan-perusahaan di dalam menjalankan fungsi produktifnya dengan semimimum mungkin hambatan birokratis dalam satu ekonomi dengan sistem pasar yang bersaingan. Keempat, memikirkan cara mengembangkan dalam masyarakat sebagai keseluruhan satu mentalitas, satu semangat industriil, yang dalam dirinya mencerminkan pengertian dan kesadaran yang mendalam di kalangan para penanggung jawab dunia usaha, politik, pemerintahan, intelektuwl, tentang semua hal yang dituntut oleh pertumbuhan daya bersaing dari industri dan usaha nasional. Akhirnya membuat risalah menge-nai tatanan ekonomi dunia sebagaimana adanya dan berdasarkan itu lalu memikirkan konsep yang kiranya kita perlukan untuk menghadapinya atau bila perlu untuk turut bermain di dalamnya guna mempengaruhi pertumbuhannya ke arah yang tidak bertentangan ataupun merusak kepentingan nasional dan keperluan perdamaian dunia.

Mengingat misi Komisi yang begitu komprehensif, maka anggotanya seharusnya tidak dibatasi pada pejabat-pejabat pemerintahan dari berbagai lembaga dan departemen, betapapun tingginya kedudukan pejabat yang bersangkutan. Keanggotaannya

harus diperluas sampai meliputi akademisi yang berasal dari berbagai macam disiplin pengetahuan, staf lembaga penelitian yang banyak sedikitnya sudah bekerja ke arah itu dan para usahawan, yaitu orang-orang yang langsung merupakan pemain dan pemegang peranan di dalam dunia industri.

Perlu ditegaskan bahwa aktipitas Komisi sementara bergerak di bidang penikiran dan perumusan (analisa). Hasil kerjanya kelak disorahkan kepada pemerintah untuk kemudian diintegirir ke dalam proses perencanaan nasional, sesedikitnya sebagai pedoman penuntun oleh para perencana di dalam mempersiapkan perencanaan dan tidak hanya berpegang pada "potunjuk" lembaga asing atau internasional.

## MNC DAN DIPLOMASI KEKUATAN EKONOMI

J. PANGLAYKIM

Jika kita memiliki perkembangan yang terjadi di dunia internasional pada umumnya dan bisnis internasional pada khususnya, tampak adanya strategi atau taktik-taktik baru dalam proses pemikiran atau pelaksanaan. Hal ini tidak terlepas dari proses perkembangan-perkembangan di dunia internasional sendiri yang saling berkaitan sehingga timbulnya interdependensi merupakan kenyataan yang tak terhindarkan lagi.

Adapun interdependensi ini sudah barang tentu tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan dimungkinkan karena adanya beberapa faktor pendorong. Faktor-faktor ini antara lain komunikasi yang makin sempurna, perkembangan teknologi, perkembangan di bidang jasa, adanya berbagai kegiatan perusahaan-perusahaan MNC yang telah menciptakan suatu jaringan keuangan internasional serta adanya perubahan-perubahan dalam perekonomian berbagai negara yang telah menyesuaikan diri pada sistem internasional.

Dalam hubungan ini pendidikan merupakan salah satu aspek yang menentukan. Berbagai bentuk dana yang disediakan untuk belajar di negara lain dan khususnya di negara-negara yang telah mempunyai lembaga seperti MNC kiranya membawa pengaruh yang tidak kecil. Ilmu yang dituntut dan waktu tinggal yang bertahun-tahun lamanya di sesuatu negara serta sistem kehidupan masyarakat setempat mempengaruhi pembentukan pemikiran dan cara berpikir si penuntut ilmu. Secara tidak sadar ia akan terbiasa dan men吸ima sebagian besar sistem yang berlaku di negara tersebut sebagai hal yang wajar dan paling efektif. Secara tidak sadar pula pada gilirannya ia akan menjadi pengaruh sistem tersebut, baik sistem ekonomi, politik dan sebagainya. Mereka yang termasuk dalam golongan ini cukup banyak dan di negara-negara berkembang mereka merupakan kelompok cerdik pandai yang pada umumnya kemudian berhasil mempunyai berbagai kedudukan yang cukup strategis baik di bidang bisnis maupun pemerintahan.

Dengan latar belakang ini adanya diplomasi yang menggunakan kekuatan ekonomi akan mempunyai arti dan akibat yang lebih besar bagi negara-negara berkembang. Misalnya jika sesuatu negara berkembang tidak sesuai dengan suatu sistem yang oleh negara-negara yang mempunyai kekuatan ekonomi dianggap terbaik, seringkali mereka mengambil tindakan-tindakan yang semata-mata hanya didasarkan pada kepentingan nasional yang sempit. Contoh mutahir adalah tindakan Amerika Serikat yang memasukkan 24 negara dalam 'daftar hitam' termasuk Indonesia dan Hong Kong. Tindakan terhadap Indonesia agaknya disebabkan ikut sertaanya Indonesia dalam CPBC. Kekuatan ekonomi tidak saja dipergunakan oleh pemerintah tetapi juga oleh lembaga-lembaga bisnis. Kekuatan ekonomi ini merupakan alat yang sangat efektif, bahkan dengan adanya jaringan-jaringan di semua benua merupakan kekuasaan ekonomi yang jauh lebih efektif daripada kekuasaan suatu negara besar.

Dalam hubungan ini alangkah baiknya jika diperhatikan perkembangan bank MNC. Jaringan yang mereka miliki di seluruh dunia memungkinkan mereka untuk menggunakan hampir semua jenis mata uang dan dapat menyalurkan sumber-sumbernya ke berbagai negara yang penggunaannya membawa keuntungan yang optimum. Dalam salah sebuah artikel di majalah Fortune, si penulis menyebutkan bahwa Presiden FNCH bahkan pernah mengatakan bahwa ongkos-ongkos di New York dibayar oleh Jakarta. Ini merupakan suatu gambaran bahwa Indonesia bagi FNCH merupakan penghasil keuntungan yang optimum dibandingkan dengan negara-negara lain. Mungkin hal yang sama dialami juga oleh bank-bank MNC lainnya. Selain itu pinjaman off shore dari Singapura dan Hong Kong yang diberikan oleh bank-bank baik yang mempunyai kantor/cabang di Jakarta atau tidak, meliputi jumlah yang tidak kecil. Adanya tingkat bunga yang tinggi di Jakarta dibandingkan dengan pinjaman off shore, menyebabkan mereka yang mempunyai kapabilitas, meminjam dari luar. Lagi pula bank-bank nasional sekali pun mempunyai dana tetapi dengan adanya ceiling, juga tidak dapat memberikan kredit usaha.

Pada hemat penulis penggunaan kekuatan ekonomi melalui lembaga bisnis adalah yang paling efektif. Melalui lembaga-lembaga bisnis pada umumnya dan lembaga-lembaga jasa pada khususnya, kekuatan ini akan memasuki 'norse system' perekonomian kita yaitu bidang keuangan/pembangunan yang merupakan 'darah'

setiap kegiatan usaha. Mengingat pentingnya masalah jasa lembaga keuangan, sebaiknya kita mengadakan semacam peninjauan kembali atas kegiatan berbagai lembaga keuangan di Indonesia.

Dalam bidang perasuransi sudah terdapat beberapa perubahan, antara lain tidak diperkenankannya perusahaan asuransi asing beroperasi sendiri, tetapi harus meleburkan diri dalam suatu bentuk kerjasama dengan usaha asuransi nasional. Dalam hal ini perusahaan asuransi asing harus mengadakan joint dan dimasukkan dalam perusahaan joint, sedangkan perusahaan asuransi nasional menjadi pemegang saham dan boleh beroperasi terus sebagai perusahaan dan tidak meleburkan diri (merger). Hal ini merupakan kebijaksanaan yang baik, yaitu adanya kesempatan untuk menggunakan keahlian dan jaringan jasa asuransi luar negeri melalui joint sedangkan perusahaan nasional yang menjadi partner tetap diberikan peluang untuk berkembang lebih pesat.

Di bidang perbankan sebaiknya kita juga mengadakan peninjauan kembali, antara lain dengan mempelajari kemungkinan penerapan kebijaksanaan yang telah diterpukuh dalam perasuransi ke bidang perbankan. Penulis tidak mengetahui dengan tepat berapa besar perbedaan yang ada antara kedua usaha ini, kemungkinan berbagai akibat dan untung rugi masing-masing pihak. Tetapi penulis cenderung untuk berpendapat jika sekiranya terjadi suatu joint, di satu pihak akan menguntungkan perkembangan perbankan nasional dan di pihak lain bank-bank nasional yang mempunyai saham dalam joint tersebut, masih tetap dapat berusaha dan berkembang sendiri. Keuntungan lain yang didapat ialah bertambahnya pengalaman, kontrol yang lebih baik dan sebagainya. Tentu tidak semua bank asing dapat melakukan kerjasama seracam ini, misalnya karena filsafat kantor pusatnya yang tidak memungkinkan dan sebagainya. Untuk ini memang masih perlu dilakukan studi yang lebih mendalam dengan memperhitungkan berbagai aspek.

Hal lain yang juga perlu mendapatkan perhatian ialah bagaimana dapat menyalurkan dana-dana off shore melalui berbagai lembaga keuangan yang mempunyai kantor di Jakarta. Dewasa ini umumnya mereka beroperasi melalui kantor-kantornya di Singapura dan/atau Hong Kong. Dalam lembaga-lembaga tersebut tidak satupun lembaga keuangan Indonesia yang mempunyai saham. Kiranya perlu dipikirkan untuk menciptakan suatu

mekanisme yang dapat mengharuskan dana-dana off shore disalurkan melalui lembaga-lembaga keuangan nasional. Atau ada baiknya juga jika lembaga-lembaga keuangan yang memberikan pinjaman off shore dianjurkan mengajak lembaga-lembaga keuangan nasional ikut serta. Umumnya Indonesia hanya dijadikan tempat/lapangan kerja tanpa diajak berpartisipasi dalam usaha-usaha mereka, sedangkan lembaga-lembaga keuangan Singapura, Hong Kong dan lain-lain diikut-sertakan.

Penggunaan kekuatan ekonomi melalui lembaga-lembaga MNC (bank dan bentuk lain) akan terus dilakukan, dan ditinjau dari segi interdependensi perokonomian internasional memang yang paling efektif dan langsung dirasakan oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Oleh karena itu adalah penting bagi kita untuk menciptakan kondisi, sarana dan kebijaksanaan yang dapat memanfaatkan serta mengimbangi pembatasan penggunaan kekuatan ekonomi itu. Pemikiran dan pendapat ini baru merupakan suatu konstataasi atas suatu kenyataan, yang masih memerlukan studi yang lebih mendalam.

## PENTINGNYA PENGUASAAN BIDANG DISTRIBUSI NASIONAL

J. PANGLAYKIM

Beberapa waktu berselang banyak dipermasalahkan dalam mass media pentingnya sektor distribusi dikuasai oleh perusahaan nasional. Peraturan mengenai hal ini memang sudah dijadikan pedoman oleh perusahaan-perusahaan nasional, tetapi dalam praktiknya banyak perusahaan asing melalui berbagai cara dan bentuk kerjasama berhasil mengatasi peraturan ini.

Berbicara mengenai distribusi, kita perlu menjelaskan dulu pengertian penggunaan istilah tersebut. Di satu pihak distribusi dapat diartikan distribusi fisik, yaitu perusahaan yang secara fisik mengusahakan penyaluran hasil-hasil industri secara langsung ke para pedagang kecil dan konsumen terakhir. Di pihak lain distribusi juga mempunyai arti yang lebih luas, yaitu sama dengan pemasaran. Apabila yang dimaksudkan adalah yang terakhir ini, maka distribusi atau penyaluran hanya merupakan bagian pemasaran.

Jika kita meninjau peraturan di atas, agaknya yang dimaksudkan adalah pemasaran harus dikuasai oleh perusahaan nasional. Dengan menggunakan pengertian ini sebagai titik tolak, kita akan meninjau beberapa aspek distribusi di Indonesia.

Paper ini akan membagi perusahaan yang bergerak dalam bidang ini menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Usaha-usaha/kesatuan ekonomi luar negeri yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan bidang distribusi/pemasaran
2. Usaha-usaha nasional
3. Usaha-usaha joint-venture

ad 1

Usaha-usaha luar negeri yang tidak mempunyai unit produksi di Indonesia, umumnya mempunyai beberapa pilihan untuk sistem yang mereka terapkan, antara lain:

- Pabrik itu dapat menunjuk sebuah perusahaan di Indonesia yang diangkat sebagai perwakilan, agen, agen tunggal; mengirimkan seorang wakil dari kantor regionalnya (misalnya Singapura), atau menunjuk agency-nya di Singapura untuk merangkum Indonesia. Penentuan salah satu bentuk ini dapat didasarkan atas volume minimum, wilayah (misalkna Jawa, Sumatra dan sebagainya), jangka waktu tertentu, dan lain-lain.
- Balam praktik mungkin kita masih ingat perusahaan-perusahaan big ten Belanda umumnya memegang keagenan tunggal beberapa perusahaan terkenal seperti Westinghouse, General Electric, Ferguson, Caterpillar, Capstan dan sebagainya. Dengan hilangnya sistem trading house, sekarang banyak terdapat berbagai bentuk usaha yang pada dasarnya ingin tetap menguasai sistem keagenan tunggal ini.
- Perusahaan-perusahaan Jepang umumnya mempunyai apa yang secara resmi dinamakan kantor penghubung (liaison office). Tetapi melihat komposisi kantor dan jumlah personel di kantor serta di perusahaan joint venture-nya, sulit untuk disebut sebagai sekedar kantor penghubung saja. Dengan staf yang berpengalaman, dalam praktiknya sulit dicegah kemungkinan keterlibatan mereka secara langsung atau tidak sebagai mata rantai yang penting dalam pemasaran produk yang mereka hasilkan di dalam negeri maupun keagenan mereka di luar negeri. Banyak perusahaan Indonesia, antara lain pabrik tekstil, membeli bahan-bahan pertahnya dari kantor penghubung ini. Dengan berbagai fasilitas yang mereka punya seperti alat-alat komunikasi yang modern dan menjangkau seluruh dunia, personel yang berpengalaman, secara praktis mereka merupakan 'perusahaan dagang dan agency' yang lengkap. Belum lagi kalau mereka harus memperjuangkan berbagai macam tender pemrintah maupun lembaga-lembaga internasional. Dengan perwakilan yang lengkap ini Jepang mempunyai kelebihan dibandingkan dengan negara-negara lain. Suatu kantor penghubung Jepang di Indonesia dimungkinkan menghubungi pedagang menongah, kecil dan konsumen torakhir secara langsung.
- Pola lain adalah yang dikembangkan oleh perusahaan Jerman. Umumnya mereka juga mempunyai semacam perwakilan. Ada yang secara resmi menggunakan nama sendiri seperti Germag dan ada juga yang menggunakan PT Indonesia. Mereka memahili

perusahaan-perusahaan di Eropa Barat dan sebagai perwakilan mereka menghubungi pabrik-pabrik dan konsumen terakhir secara teratur untuk mendapatkan order. Order-order ini umumnya disalurkan melalui perusahaan atau PT Indonesia, tetapi bisnis yang digerakkan melalui berbagai perwakilan biasanya, mengirimkan seorang atau beberapa orang staf Jerman. Dibandingkan dengan kantor penghubung Jepang, staf mereka jauh lebih kurang tetapi cukup aktif dan kebanyakan mengkhususkan diri dalam produksi mesin-mesin.

- Perusahaan Amerika mempunyai lebih banyak perwakilan di Singapura dan dari sana mencoba merangkum Indonesia dengan mengirimkan orang-orangnya atau dengan membuka perwakilan sendiri. Ford misalnya menunjuk perusahaan Indonesia sebagai agen tunggal. Selain itu ada juga perusahaan Inggris di Singapura dan Hongkong yang memasukkan Indonesia dalam wilayahnya, sehingga perusahaan atau wakil perorangan di Indonesia hanya bertindak sebagai sub-agen dengan keagenan tunggal yang tetap dipegang oleh perusahaan yang berkedudukan di Singapura atau Hongkong. Perusahaan besar seperti Singer sejak sebelum perang sudah mempunyai usaha di Indonesia, bahkan sekarang mungkin sudah mengadakan joint dengan perusahaan nasional.
- Sementara itu banyak perusahaan Belanda telah mengadakan berbagai bentuk kerjasama dengan perusahaan nasional. Ada yang bekerja di sini sebagai penasihat perusahaan Indonesia dan menggunakan perusahaan Indonesia sebagai wahana untuk menjalankan bisnisnya, ada pula yang mengizinkan penggunaan nama perusahaannya yang sudah terkenal di Indonesia berdasarkan suatu persetujuan dasar. Ada juga yang menggunakan nama perusahaan nasional tetapi seluruh kekuasaan dipegang oleh personel asing.

#### ad 2

Usaha-usaha nasional harus secara resmi menguasai distribusi hasil-hasil dalam negeri. Jika perusahaan itu tergolong dalam PITDN, dapat dikatakan distribusi sudah dipegang oleh suatu perusahaan nasional yang baik. Tetapi sesuai dengan perkembangan di bidang distribusi, yang penting adalah bahwa perusahaan distribusi nasional selalu harus mempertimbangkan asortimen hasil-hasil pabrik. Misalkan sebuah pabrik farasi tidak dapat menyalurkan hasil-hasil pabriknya saja, karena tidak akan dapat

menutup pembiayaan aparat distribusi. Oleh karena itu banyak di antara aparat distribusi perusahaan farmasi melengkapi dirinya dengan lebih banyak produk sehingga dapat menyediakan suatu asortimen. Umumnya mereka sudah mempunyai prasarana dan karenanya dapat menjadi tambah kuat jika mampu menyediakan se rangkaian produk. Beberapa pabrik seperti pabrik baterai misalnya yang sudah mempunyai aparat distribusinya sendiri mulai merasa bahwa cara yang ditempuhnya kurang menguntungkan. Karena itu mereka menggunakan aparat seperti yang telah dikembangkan oleh perusahaan farmasi.

### ad 3

Dalam usaha-usaha joint venture, seringkali patent masih dipegang oleh pihak asing dan bukan joint venture-nya sekalipun yang terakhir ini sudah membayar royalty. Bahkan distribusinya pun seringkali ingin mereka pegang secara langsung sekalipun mereka sudah menggunakan sistem agen dalam negeri atas dasar pembagian wilayah. Acapkali timbul perselisihan jika pihak Indonesia ingin membentuk aparat distribusinya sendiri. Sebagai contoh ada sebuah joint venture tekstil dengan Jepang di Surabaya yang pada waktu pembukaannya menampilkan partner asingnya di muka dan partner Indonesiannya di belakang. Sudah barang tentu hal semacam ini sangat menyinggung perasaan dan dapat diramalkan bahwa dalam perkenbangannya akan banyak mengalami berbagai pertentangan.

Berbagai masalah yang dikemukakan menunjukkan bahwa distribusi sebagai bagian pemasaran hal yang sangat pokok untuk setiap kesatuan produksi. Ini berarti bahwa setiap unit produksi, baik asing, joint venture maupun nasional, harus menganggap bidang ini sebagai 'jantung' perusahaan yang sebagian besar menentukan suksesnya perusahaan tersebut. Dengan dominikan negara dapat dipahami adanya ambisi baik pihak asing maupun nasional untuk menguasai bidang ini. Banyak hasil-hasil dalam negeri sudah dapat ditangani oleh perusahaan nasional, tetapi di kalangan joint venture masih banyak partner asing berusaha menguasai bidang ini.

Untuk sistem agency hasil-hasil luar negeri terdapat gambaran yang berlainan, khususnya untuk bahan-bahan mentah, barang-barang industri dan barang-barang modal. Dalam bidang-bidang ini masih banyak terdapat berbagai usaha asing yang secara langsung menangani hal-hal yang seyogyanya sudah harus

ditangani oleh perusahaan nasional. Secara formal/legal mungkin dipakai berbagai bentuk perusahaan nasional, tetapi sebenarnya sepenuhnya dikuasai oleh asing.

Untuk mengadakan suatu penertiban di bidang distribusi ini diperlukan suatu analisa yang mendalam dan tepat untuk menghindarkan terjadinya kerosongan, terutama mengingat betapa vitalnya bidang ini bagi kelancaran jalannya roda perekonomian Indonesia. Diharapkan bahwa kebijaksanaan yang akan dituangkan dalam suatu peraturan benar-benar terarah dan mengenai sasaran. Ini berarti perlunya suatu kerjasama yang erat antara beberapa instansi tanpa melupakan dunia bisnis dan industri nasional. Kiranya sudah bukan masanya untuk mengadakan berbagai eksperimen lagi, yang dibutuhkan justru suatu 'enforcement' yang penuh kebijaksanaan.

